



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

**RENCANA KINERJA TAHUN (RKT)
2023**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2023 dapat selesai tepat pada waktunya.

RKT ini berisi penjelasan Program dan Kegiatan serta Prakiraan maju anggaran Tahun 2023 secara keseluruhan bidang – bidang / UPTD yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada manajemen identitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media penjabaran Rencana Strategis serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yakni dengan visi Walikota terpilih adalah "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH".

Cirebon, 02 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON



DISTANDIA ARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691214 199003 1 005

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018 – 2023. Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapat dorongan yang besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Perencanaan dibagi menjadi tiga bagian antara lain Rencana jangka panjang dengan periode 20 tahun, Rencana jangka menengah dengan periode 5 tahun dan periode tahunan.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan tahun 2023 untuk selanjutnya disebut RKT Dinas Perhubungan Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap Organisasi perangkat Daerah atau yang disingkat OPD membuat Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun kedua (kedua) pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas atau dengan kata lain merupakan kelanjutan rencana kerja tahunan Dinas tahun 2023.

Atas dasar alur tersebut Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2023 yang menyajikan target kinerja tahun 2022 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategik serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi-nya " TERWUJUDNYA PELAYANAN

PERHUBUNGAN YANG SANTUN MENUJU KOTA CIREBON RAMAH TAHUN 2023 ”.

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang SANTUN merupakan kepanjangan dari Selamat, Aman, Nyaman, Tertib dan Unggul di bidang Perhubungan serta pelayanan administrasi.

- **Selamat** diindikasikan oleh menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- **Aman** diindikasikan oleh menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- **Nyaman** diindikasikan oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang nyaman bagi pengguna jasa transportasi;
- **Tertib** diindikasikan oleh terselenggaranya kesadaran masyarakat atau pengguna jasa transportasi dalam menggunakan moda transportasi yang tertib sebagai bentuk pelayanan transportasi yang tertib berlalu lintas;
- **Unggul** diindikasikan oleh meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Cirebon, ditetapkan Misi yang harus dilakukan yaitu “ *Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* ”

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dan landasan konstitusional Dinas Perhubungan adalah Pancasila dan Undang-undang 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
 24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2023.

b. Tujuan

- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Cirebon
- Menetapkan usulan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan serta target dalam pencapaian kinerja pada tahun anggaran mendatang.

1.4 RENCANA KINERJA

Untuk mengontrol kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu dilaksanakannya rencana kinerja yang sesuai. Berikut adalah tabel rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

**TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | |
|--|---|---------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MISI 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan | | | | | | |
| | Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan | | | Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan | 3 | Persen |
| | Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas | | | Jumlah Titik Rawan Kemacetan | 1 | Titik |
| | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 | Persen |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| | NON URUSAN | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1. Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran | 100 | persen |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja | 7 | jenis |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah | 100 | persen |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Dokumen Renja PD | 1 | dokumen |
| | | | | Dokumen Renja PD Perubahan | 1 | dokumen |
| | | | | Dokumen Renstra PD | 1 | dokumen |
| | | | | Dokumen Renstra Perubahan PD | 0 | dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Dokumen RKA | 1 | dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Dokumen RKA-Perubahan | 1 | dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Dokumen DPA | 1 | dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Dokumen DPA Perubahan | 1 | dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Laporan pelaksanaan realisasi kinerja tahunan | 1 | dokumen |
| | | | | Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulan | 4 | dokumen |
| | | | | Laporan PK | 1 | dokumen |
| | | | | Tersedianya Honor PTT | 1 | orang |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III | 3 | dokumen |
| | | | | Dokumen Dalev Triwulan IV | 1 | dokumen |
| | | | | Dokumen SOP Dishub | 1 | dokumen |
| | | | | LAKIP | 1 | dokumen |
| | | | | LKPJ | 1 | dokumen |
| | | | | LPPD | 1 | dokumen |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Keluaran: Dokumen Administrasi Keuangan | 2 | jenis |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya Informasi Administrasi Keuangan Sebagai Bahan Audit Keuangan Perangkat Daerah | 100 | Persen |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 117 | orang |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Laporan keuangan akhir tahun (CALK) | 1 | dokumen |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | Keluaran: Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 | jenis |
| | | | | Hasil: Tewujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | Persen |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Pakaian dinas harian | 145 | stel |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Keluaran: Dokumen Administrasi Umum | 6 | jenis |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | | |
|----|--------|---------|--|--|------------|-------------------|--|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah | 100 | Persen | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 50 | item | |
| | | | | Materai 10.000 | 1350 | buah | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Isi tabung LPG 12 kg | 12 | kali | |
| | | | | Tabung APAR | 20 | unit | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan | 11 | jenis | |
| | | | | Penggandaan | 51956 | lembar | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Buku / Peraturan Perundang-undangan | 5 | buku | |
| | | | | Surat Kabar Harian Lokal | 3 | koran / media | |
| | | | | Surat Kabar Harian Nasional | 1 | koran / media | |
| | | | | Surat Kabar Harian Regional/Provinsi | 1 | koran / media | |
| | | | | Terpasangnya Iklan di surat kabar harian | 60 | iklan | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan penerimaan/ kunjungan tamu | 12 | laporan | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan makanan dan minuman harian pegawai | 12 | laporan | |
| | | | | Laporan/ Notulensi rapat internal/briefing | 12 | laporan | |
| | | | | Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 | laporan | |
| | | | | Laporan sinergitas | 1 | laporan | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Keluaran: Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 | jenis | |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | Persen | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor | 4 | jenis | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perlengkapan gedung kantor | 2 | jenis | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan R4 | 2 | unit | |
| | | | | Kendaraan R2 | 6 | unit | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | Jenis | |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM) | 36 | struk rekening | |
| | | | | Struk pembayaran tagihan rekening telepon | 12 | struk rekening | |
| | | | | Struk pembayaran tagihan rekening TV Satelit | 36 | struk rekening | |
| | | | | Struk pembayaran tagihan rekening listrik | 36 | struk rekening | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Petugas/Tenaga pengamanan | 15 | orang | |
| | | | | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 28 | jenis | |
| | | | | Petugas/ Tenaga kebersihan kantor | 8 | orang | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 | jenis | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | |
|----|--------|---------|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Hasil: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM Kendaraan R4 | 1 unit | |
| | | | | Pelumas Kendaraan R4 | 1 unit | |
| | | | | Servis Kendaraan R4 | 1 unit | |
| | | | | Suku cadang Kendaraan R4 | 1 unit | |
| | | | | STNK/SKPD PKB R4 | 1 unit | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KIR Pick Up | 4 unit | |
| | | | | KIR Truk | 3 unit | |
| | | | | STNK/SKPD PKB Bus dan Truk | 3 unit | |
| | | | | STNK/SKPD PKB R2 | 32 unit | |
| | | | | STNK/SKPD PKB R3 | 3 unit | |
| | | | | STNK/SKPD PKB R4 | 4 unit | |
| | | | | BBM Kendaraan R2 | 32 unit | |
| | | | | BBM Kendaraan R3 | 3 unit | |
| | | | | BBM Kendaraan R4 | 8 unit | |
| | | | | BBM Kendaraan R6 | 3 unit | |
| | | | | Pelumas Kendaraan R2 | 32 unit | |
| | | | | Pelumas Kendaraan R3 | 3 unit | |
| | | | | Pelumas Kendaraan R4 | 8 unit | |
| | | | | Pelumas Kendaraan R6 | 3 unit | |
| | | | | Servis Kendaraan R2 | 32 unit | |
| | | | | Servis Kendaraan R3 | 3 unit | |
| | | | | Servis Kendaraan R4 | 8 unit | |
| | | | | Servis Kendaraan R6 | 3 unit | |
| | | | | Suku Cadang Kendaraan R2 | 32 unit | |
| | | | | Suku Cadang Kendaraan R3 | 3 unit | |
| | | | Suku Cadang Kendaraan R4 | 8 unit | | |
| | | | Suku Cadang Kendaraan R6 | 3 unit | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor | 3 unit kantor | |
| | | | | Pengadaan dan pemeliharaan pagar dan gapura kantor Dukuh Semar | 28 Meter | |
| | | | | Pengaspalan dan Pemeliharaan Kawasan Terminal Dukuh Semar | 939 M2 | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan gedung kantor | 3 Jenis | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perlengkapan gedung kantor | 3 Jenis | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| | | | URUSAN PERHUBUNGAN | | | |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1. Pemasangan Rambu rambu((jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia) x 100%) | 10 persen | |
| | | | | 2. Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek)/jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab) | 100 persen | |
| | | | | 3. Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%) | 100 persen | |
| | | | | 4. Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%) | 85 persen | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | |
|----|--------|---------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 5. presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%) | 100 | persen |
| | | | | 6. Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%) | 100 | persen |
| | | | | 7. Persentase layanan angkutan darat ((jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) x 100%) | 1,53 | persen |
| | | | | 1. Pemasangan Rambu rambu (jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia x 100%) | 10 | persen |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Keluaran: Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan | 3 | Jenis |
| | | | | Hasil: Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 | persen |
| | | | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Halte | 0 | halte |
| | | | | pengadaan parkir khusus sepeda | 2 | unit |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan UPT PJU | 2 | unit kendaraan |
| | | | | Pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan | 300 | titik |
| | | | | Pemeliharaan PJU | 8913 | Titik |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | pemeliharaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas | 1000 | m2 |
| | | | | Lokasi rambu lalu lintas yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas | 50 | titik |
| | | | | pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon | 3 | orang |
| | | | | Lokasi traffic light yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas | 32 | titik simpang |
| | | | | 2. Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek)/jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab) | 0 | persen |
| | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Keluaran : Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 0 | Jenis |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 0 | persen |
| | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah | 0 | dokumen |
| | | | | 3. Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%) | 93 | persen |
| | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Keluaran : Dokumen Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 2 | Jenis |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | |
|----|--------|---------|--|---|-------------------|------------|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | |
| | | | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pembinaan Petugas Parkir | 4 kali | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | buku karcis, bbm, atk | 1 tahun | |
| | | | | dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran | 1 dokumen | |
| | | | | 4. Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%) | 78 persen | |
| | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Keluaran : Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Jenis | |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 persen | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM | 1 tahun | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 5 orang | |
| | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Bentuk <i>Smart Card</i> | 2 jenis | |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | kestabilan dan akurasi alat uji laik jalan kendaraan bermotor | 9 Unit | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 laporan | |
| | | | | 5. presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%) | 100 persen | |
| | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 3 Jenis | |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 100 persen | |
| | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | pengadaan apil | 1 titik simpang | |
| | | | | Pemeliharaan Halte | 0 | |
| | | | | pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | 100 buah | |
| | | | | pengadaan jalur sepeda | 500 M2 | |
| | | | | pengelolaan website | 1 laporan | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | |
|----|--------|---------|---|---|--------------------|------------|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan | 2 kali | |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota | Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi) | 1 tahun | |
| | | | | Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Angkutan Umum | 2 Kali | |
| | | | | Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru | 3 Kali | |
| | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Forum Perangkat Daerah | 2 dokumen | |
| | | | | 6. Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ((jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%) | 100 persen | |
| | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Keluaran : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan | 2 Jenis | |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 100 persen | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota Cirebon terpilih | 3 orang | |
| | | | | Dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas | 0 dokumen | |
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN) | 1 dokumen | |
| | | | | sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas | 0 Kali | |
| | | | | sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan | 0 Kali | |
| | | | | pemberian pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan | 50 orang | |
| | | | | 7. Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat*100%) | 1,53 persen | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2022 | | |
|--|--------|--------------|--|--|------------|-----------------|--|
| | | | | | TARGET | KETERANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran : Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | 1 | Jenis | |
| | | | | Hasil : Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | 27,35 | persen | |
| | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Trayek BRT di Kota Cirebon | 1 | Lintasan trayek | |
| | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah | 1 | Jenis | |
| | | | | Hasil : Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan | 90 | Persen | |
| | | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Pembinaan sopir / awak angkutan umum | 50 | orang | |
| | | | | Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota Cirebon | 3 | orang | |
| Teridentifikasinya armada dan krew angkutan kota di masing-masing trayek | 979 | supir angkot | | | | | |

Cirebon, 02 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
CIREBON



Drs. ANGGI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

1.5 Kesimpulan

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi, Misi Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT OPD) periode tahun 2023. RKT merupakan pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya untuk satu tahun mendatang. RKT Dinas disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja dinas, diantaranya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tentu saja disesuaikan dengan program dan kegiatan Wali Kota. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan memuat Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas yang kemudian di breakdown lagi menjadi program dan kegiatan. Semua aspek merupakan kristalisasi dari usulan, saran, masukan, dan aspirasi tiga bidang, satu sekretariat dan tiga UPT.

1.6 Saran

Perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dinas dalam upaya mewujudkan apa yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dukungan dari luar OPD juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon.